

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan tahun pada tahun 1330 H atau bertepatan dengan tahun 1912 M¹. Gerakan ini lahir di Kauman Yogyakarta, yaitu sebuah kampung di samping Kraton Yogyakarta. Sesuai namanya Kauman adalah kampung yang banyak berisi kaum atau para ahli Agama. Dengan demikian Muhammadiyah lahir di tengah masyarakat yang taat menjalankan Islam. Namun Demikian Islam yang berjalan di masyarakat muslim pada umumnya, termasuk Kauman di dalamnya, adalah Islam yang dalam pandangan Kyai Dahlan tidak saja telah berakulturasi dengan budaya Jawa, lebih dari itu , yaitu Islam yang telah terkungkung oleh hegemoni budaya Jawa. Kehadiran Muhammadiyah adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap praktek Islam yang dianggap keliru itu. Paling tidak ada dua hal yang dapat menjelaskan kehidupan umat Islam masa itu, *pertama*, Islam dipahami sebagai agama ritual yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Tetapi ajaran-ajaran Islam yang diamalkan oleh umat tidak menyentuh persoalan-persoalan social kemasyarakatan yang berkembang. Meskipun banyak ahli agama, banyak juga berdiri pesantren, tetapi pengembangan keilmuan Islam hanya berputar-putar pada persoalan-persoalan ilmu itu sendiri, yang kebanyakan adalah ilmu kebahasaan (*nahwu, shorof*), fiqh ibadah dan masalah-masalah keimanan yang tidak menyentuh problem actual keumatan² *Kedua*, adalah kenyataan tentang ketertinggalan umat Islam dalam bidang social politik dan ekonomi yang menjadikan umat Islam sebagai umat pinggiran yang tidak ikut menentukan arah perubahan masyarakat³.

¹ Tim Penyusun, *Kemuhammadiyah; jilid I*, (Yogyakarta : Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal. 17

² Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2000), hal. 53

³ Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000), hal. 49-62

Peneletian ini menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya kultur politik Muhammadiyah pada masa sebelum dan setelah reformasi begitupun kultur politiknya ketika menghadapi masa pra kemerdekaan, Sebagai salah satu pelopor gerakan kebangsaan, Ormas Muhammadiyah dikenal sebagai Organisasi Keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada pencerahan umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam gerakan dakwahnya Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai banyak wajah dalam arti netral, yang menunjukkan bahwa gerakan Islam modernis ini tidak dapat ditilik hanya dari satu sisi dengan satu wajah tetapi memerlukan pendekatan yang holistik⁴. Muhammadiyah juga dikenal memiliki peranan dalam gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yakni sebagai *a religious reformist, agent of social changes, and a political force*, khususnya pada masa Kolonialisme⁵.

Oleh karena itu sebagai salah satu ormas yang mempunyai semboyan sebagai *agent of change* maka untuk memahami segala kultur yang ada penulis menggunakan metode penelitian Historis Deskriptif Kualitatif, dalam peranannya Muhammadiyah tampil dalam gerakan pemurnian dengan memberantas syirik, takhayul, bida'ah dan khurafat dikalangan Umat Islam. Sebagai agen perubahan social, ia melakukan modernisasi sosial dan pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat Islam. Muhammadiyah sebagai kekuatan politik, memerankan diri selaku kelompok kepentingan. Beberapa sisi dari wajah Muhammadiyah itu pada umumnya bermuara pada satu predikat yakni gerakan tajdid, gerakan pembaharu, gerakan reformis atau modernis.

Gerakan pembaharuan itu merefleksikan upaya proses reislamisasi yang terus menerus di kalangan kaum muslim yang meliputi proses: (1) Upaya pemahaman yang benar tentang praktik-praktik keagamaan dan usaha-usaha yang diarahkan untuk pemurnian kepercayaan dan ritual Islam

⁴ PP Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah*, (Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Cetakan III-1996), hal. 39

⁵ Alfian, *Muhammadiyah : The Political Behavior Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989), Hal. 5

dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang : (2) Penegasan kembali ajaran-ajaran pokok tentang urusan-urusan keduniaan: dan (3) Penafsiran terhadap Islam yang membikan dasar sebuah wawasan, bahwa Islam memiliki potensi dan kemampuan untuk beradaptasi dan berubah⁶. Namun demikian, Muhammadiyah yang telah melewati banyak rezim dalam sejarah Indonesia tentu juga bukanlah suatu golongan yang sempurna.

Banyak kritikan dialamatkan kepadanya, diantaranya ialah :

1. Saat ini Muhammadiyah dianggap telah melamban bahkan mandeg sebagai gerakan pembaharuan. Prof. Dadang Kahmad (Ketua PWM Jawa Barat periode 2005-2010) mengatakan: *“dengan jumlah anggota yang konon mencapai 30 juta lebih, organisasi ini justru menjadi lamban dalam merespon dan mengelola masyarakat dan jamaahnya⁷”*.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah menyangkut sekolah bermeja kursi, memadukan ilmu agama dan umum adalah pembaharuan di awal pergerakan Muhammadiyah. Demikian juga pelurusan arah kiblat, pembagian zakat untuk orang miskin dan beberapa yang lain. Sementara perkembangan zaman semakin maju, dinamika dan problem masyarakat semakin kompleks. Muhammadiyah justru mandeg dengan kreasinya di masa lalu. Dalam pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005, Dr. Masykur Wiratmo pernah mengatakan: *“Muhammadiyah itu modern di masa lalu, tapi sekarang tidak lagi. Manajemen Muhammadiyah justru tertinggal jauh dari yang lain. Muhammadiyah yang telah tumbuh menjadi organisasi birokrasi juga telah dipertanyakan kemampuannya menjadi pembaharu dengan birokrasinya yang panjang itu⁸”*.

⁶ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya : LPAM, 2002), hal. 2 .

⁷ Beni Setiawan, *Migrasi Jamaah; Tantangan Dakwah Muhammadiyah Jelang Satu Abad*, (Yogyakarta : Panji, 2007), Hal. 74

⁸ Syamsul Arifin, *Satu Abad Muhammadiyah; Mengkaji Ulang Arah Pembaharuan*, (Jakarta: Paramadina, 2010), Hal. 180-181

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tumbuh dominan hanya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah tidak tumbuh pesat pada sector-sektro lain yang sesungguhnya juga penting sebagai sarana mewujudkan cita-cita perjuangannya. Dari semua amal usaha Muhammadiyah yang berjumlah 8791 lembaga, 89,6% diantaranya adalah di bidang pendidikan, yaitu berupa sekolah dari Taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, 5,1% di bidang kesehatan, berupa rumah sakit dan balai-balai pengobatan, dan 5,1 % di bidang social, berupa panti asuhan dan panti rehabilitasi⁹. Dari jumlah amal usaha, sesungguhnya Muhammadiyah sudah dapat dinilai sebagai Organisasi yang luar biasa besar. Namun jika dilihat dari luasnya sector kehidupan masyarakat, amal usaha Muhammadiyah tampak masih terbatas di tiga bidang saja, dan belum menjangkau banyak bidang yang lain, seperti bidang ekonomi atau bidang hukum. Muhammadiyah juga belum menampakkan banyak perannya dalam pemberantasan korupsi, trafficking, konflik-konflik horizontal, dan lain sebagainya. Padahal amanah kepribadian Muhammadiyah adalah gerak di segenap bidang dan lapangan¹⁰.

Adapun kita ketahui bagaimana kultur politik Muhammadiyah dalam menyikapi setiap dinamika politik di Indonesia, Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang dilapangan politik serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut “khittah” (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada khittah ini terlihat dari : Khittah Palembang (1956-1959), khittah Ponorogo (1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Denpasar (2002).¹¹

⁹ LPI PP Muhammadiyah, Profil I Abad Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010), Hal. xii

¹⁰ Hamndan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 41

¹¹ Haeda Nashir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), hal. 15

Pada prinsipnya melalui khittah yang dilangsungkan beberapa kali ingin melakukan penegasan ulang bahwa secara garis besar menentukan kebijakan dan prioritas gerakannya untuk:

1. Menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan, arahan, pedoman dan ketentuan dalam bersikap dan bertindak atas nama organisasi.
2. Menempatkan secara objektif dan verifikasi kerja mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan Negara.
3. Penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di lapangan politik praktis atau politik yang berorientasi pada kekuasaan.
4. Garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak ada hubungan organisatoris dengan kekuatan/partai politik manapun sebagai posisi objektif untuk bersikap netral/berjarak dan tidak mengimpitkan diri, mendukung, dan bekerja sama secara politik dengan organisasi politik tersebut.¹²
5. Garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, serta untuk memilih atau tidak pilihan politik sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan yang digariskan perserikatan.
6. Pandangan teologis Muhammadiyah yang tentang politik sebagai arena “urusan duniawi” yang berlaku hukum ijtihad dan kebijakan organisasi.
7. Peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak aktif/tidak memilih perjuangan politik praktis, tetapi proaktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara serta menentukan sikap tertentu terhadap kebijakan-kebijakan Negara sebagaimana layaknya kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan

¹² Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hal. 45

dalam sebuah Negara yang demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral-keagamaan dan bukan sebagai kekuatan politik.¹³

Perkembangan politik di kalangan Muhammadiyah itu ditandai oleh kehadiran M. Amien Rais di panggung politik nasional dengan mendirikan partai politik yang bersifat terbuka (inklusif), yaitu Partai Amanat Nasional pada hari Ahad 23 Agustus 1998 di Jakarta. Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan M. Amien Rais itu dalam kaitan dengan perjalanan tokoh Muhammadiyah ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari semangat gerakan reformasi yang dipeloporkannya bersama mahasiswa dan komponen bangsa lainnya sejak dirinya mengagagas isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada 1993 yang diikuti oleh langkah-langkah politik yang kontroversial sepanjang lima tahun sesudahnya. Sejak Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden.

Hubungan antara Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi perantara dan organisasi politik setelah terbentuknya PAN ini dipandang sebagai bagian dari ijtihad politik Muhammadiyah.¹⁴ Tidak pernah terjadi sebelumnya Muhammadiyah sedemikian dekat dengan partai politik selama pemilihan umum dan Pemilu Presiden; juga tidak pernah berlangsung sebelumnya perdebatan yang begitu dinamis dan terbuka tentang politik di tingkat Muhammadiyah dan di kalangan para pemimpinnya. Kedua organisasi ini memainkan kontribusi yang signifikan terhadap proses demokrasi Indonesia.

Peran politik Muhammadiyah, dalam beberapa hal dilakukan elitnya, seperti Amien Rais. Reputasi Amien Rais di kalangan Muhammadiyah memberi efek positif bagi PAN. Partai ini dengan mudah berdiri di berbagai daerah atas dukungan warga Muhammadiyah. Sejak kelahiran PAN itulah tumbuh dinamika politik baru dalam Muhammadiyah. Hampir sebagian besar elit dan warga

¹³ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hal. 44

¹⁴ Suaidi Asyari, *Nalar Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta : LKIS, 2009), hal. 128-129

Muhamadiyah diberbagai tingkatan aktif sebagai inisiator dan kemudian banyak diantaranya yang aktif sebagai pengurus dan pimpinan PAN, selain hanya menjadi pendukung dan simpatisan. Kelahiran PAN itu hingga batas tertentu menumbuhkan persaingan politik di kalangan Intern Muhammadiyah sendiri. Haidar Nashir menjelaskan gejala persaingan politik dapat dilihat dari beberapa indikasi:

1. Sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah aktif dan mendukung PAN, sementara lainnya masih mendukung partai lama seperti PPP, Golkar, PBB, dan PKS.
2. Implikasi dari gejala yang pertama, tumbuh gesekan kepentingan antara elit dan warga Muhammadiyah dalam memperluas dukungan masing-masing partai, seperti Pemilu 1999 menimbulkan ketegangan politik tertentu di kalangan Muhammadiyah. Gesekan itu diwarnai pula oleh wacana teologis tentang pluralism dengan keanggotaan PAN yang terbuka bagi semua kalangan termasuk bagi warga yang Bergama non- Islam.¹⁵

Dalam situasi yang seperti ini Muhammadiyah relative beruntung karena secara umum kondisi internal dalam tubuh organisasi ini dapat terkendali sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan disintegrasi politik yang membahayakan keruntuhan Muhammadiyah. Keadaan ini didukung oleh :

1. Kedewasaan sikap politik pada umumnya elit dan warga Muhammadiyah untuk tetap memelihara keutuhan dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan pribadi dan kelompok politik.
2. Kebijakan Muhammadiyah secara organisasi yang tetap menjaga jarak dan sikap netral dari kekuatan politik maupun sebagaimana ditunjukkan oleh edaran PP Muhammadiyah.

¹⁵ Haedar Nashir, Perilaku Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta : Tarawang, 2000), hal. 213-2014

3. Munculnya kekuatan moderat di kalangan Muhammadiyah sendiri dari elit dan warga yang tidak terlihat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah satu factor peredam dari berbagai konflik kepentingan politik.

Berdasarkan penjesan di atas, terlihat fakta menunjukkan bahwa budaya politik Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam semangat Khittah 1971 dan termanifestasi dalam alam pikiran para elit dan warganya relative stabil dan konsisten dalam pola yang moderet. Kelahiran PAN kendati memperoleh dukungan luas sehingga terkesan berhimpitan langsung dengan Muhammadiyah sendiri, sebagaimana dipandang oleh banyak pihak, ternyata tidak serta merta mengubah budaya politik moderat Muhammadiyah dalam menyikapi keadaan yang kritis sekalipun. Secara normative dan aturan resmi organisasi, Muhammadiyah masih mampu menjaga jarak dengan partai politik. Sikap netral ini tergambar melalui surat PP Muhammadiyah yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang menyerukan agar menjaga kemurnian dan keutuhan organisasi.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kultur Politik Muhammadiyah sebelum masa Reformasi?
2. Bagaimana Kultur Politik Muhammadiyah pada masa Reformasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kultur Politik Muhammadiyah sebelum masa reformasi?
2. Untuk mengetahui Kultur Politik Muhammadiyah pada masa Reformasi?

D. Kajian Pustaka

¹⁶ Haedar Nashir, Perilaku Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta : Tarawang, 2000), hal. 213-2014.

Setelah melakukan penelusuran, sampai saat ini setidaknya penulis telah menemukan karya-karya ilmiah yang menginformasikan atau berkaitan dengan Kultur Politik Muhammadiyah di Indonesia pada masa Reformasi 1998-2014. Penelusuran ini penulis kira perlu dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang kurang etis dalam ruang lingkup akademik. Adapun beberapa karya atau tulisan ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adapun karya Syafii Maarif, jurnal nya yang berjudul Teologi Politik Muhammadiyah, dalam jurnal tersebut penulis memberikan pandangannya tentang dasar Teologi Politik Muhammadiyah, menurutnya sedari awal didirikannya, Muhammadiyah tetap menganut dan memegang teguh Asas Keislamannya, maka pengambilan sikap Muhammadiyah dalam dinamika perpolitikan Indonesia ialah megedepankan Asas Keislaman, namun pada zaman orde baru terjadi sedikit perubahan mengenai Asas tersebut, maka dari itu demi keberlangsungan Organisasi, Muhammadiyah mau tidak mau, harus menjadi sedikit Fleksibel. Penulis mengatakan bahwa urusan kepemimpinan lebih penting dibandingkan urusan yang lainnya, sebab urusan kepemimpinan kelak akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan umat di masa depan serta untuk menjaga moralitas penduduk suatu negeri tersebut, penulis juga mengatakan bahwa Muhammadiyah dan Politik merupakan satu kesatuan yang tak akan bisa terpisahkan sejak awal didirikannya, namun bukan berarti menjadikan Muhammadiyah menjadi ormas politik hanya saja melihat bahwa suatu kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan penting untuk kemajuan bangsa dan Negara maka politik menjadi suatu hal yang tak kalah penting dalam perkembangan Organisasi untuk kedepannya.
2. Karya dari Bahtiar Effendy, dalam karyanya beliau menyatakan bahwasannya jika berbicara politik sebagian warga persyarikatan memandangnya sebagai suatu hal yang sedikit

negative, hal ini bukan tanpa faktor, menurut beliau salah satu faktor yang paling mendominasi ialah kurangnya kesadaran sebagian warga Muhammadiyah tentang pendidikan politik, jika kita renungkan sebenarnya pengembangan dalam bidang politik itu sama pentingnya dengan pengembangan amal usaha lainnya, missal seperti yang sering kita dengar yakni bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut beliau, kesadaran politik merupakan salah satu kunci kemajuan untuk warga persyarikatan, mau tidak mau kita harus menyadari bahwa dinamika politik Indonesia dari hari ke hari makin panas, maka sebenarnya disinilah kesempatan warga persyarikatan untuk mulai menunjukkan kecakapannya dalam pengelolaan umat, bangsa dan Negara. Dalam hal politik beliau menekankan bahwa untuk berperan dalam politik tak ada kewajiban agar harus membuat Partai Politik, warga persyarikatan bisa berperan dalam politik dengan cara apapun, karena bagaimanapun juga zaman akan terus berubah, maka persyarikatan pun harus siap dengan segala perubahan-perubahan tersebut.

3. Karya Jurnal Ilmiah dari Hajriyanto H. Thohari yang berjudul Meletakkan Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik, salah satu karya beliau yang bersifat mengkritik beberapa pandangan dari sebagian kader Muhammadiyah yang menganggap bahwa Politik itu negative dan memiliki kecendrungan sifat yang pesimis. Menurutnya, dalam salah satu bagian anggaran dasar Muhammadiyah terdapat redaksi kata yang mengharuskan kita agar selalu berpikiran positive dan optimis dalam menapaki segala persoalan kehidupan dunia termasuk persoalan dinamika perpolitikan di Indonesia. Dalam karyanya juga sang penulis memberikan pesan-pesan serta solusi-solusi yang solutif untuk kemajuan Muhammadiyah di masa depan, dari karya-karya yang selama ini saya telaah, karya beliaulah yang menurut saya lebih memiliki keberanian untuk mengungkap seberapa pentingnya berpolitik untuk

kebaikan Muhammadiyah. Dalam karyanya ini beliau tidak menarasikan awal berdirinya sejarah Muhammadiyah, namun beliau lebih memandang dan berpendapat bagaimana Muhammadiyah agar tidak anti atau apatis terhadap perpolitikan Indonesia termasuk politik praktis.

4. Buku karya dari MPK PP Muhammadiyah yang berjudul Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khiththah dan Langkah. Buku ini diterbitkan secara resmi oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini berisi berbagai keputusan resmi Muhammadiyah yang mewakili pandangan Muhammadiyah tentang berbagai hal mendasar gerakan Muhammadiyah . Buku ini penting bagi penelitian ini karena berisi tentang pikiran-pikiran pokok dalam Muhammadiyah yang akan melandasi bagaimana sistem kaderisasi dan sikap politik Muhammadiyah itu dibangun. Buku ini tidak terkait khusus dengan perkaderan atau kaderisasi, tetapi dasar-dasar ideologi Muhammadiyah yang termuat dalam buku ini menjadi sangat penting dalam proses kaderisasi karena dasar-dasar inilah yang menjadi muatan kaderisasi itu sendiri.
5. Haedar Nashir, dalam bukunya yang berjudul Khittah Muhammadiyah tentang Politik
6. Buku Islam Dan Negara dalam Politik Orde Baru karya Abdul Aziz Thaba, mengulas hubungan Islam dan Negara pada masa Orde Baru, dimana menurutnya dalam tahun-tahun awal konsolidasinya mengalami masa pasang akan tetapi kembali surut sejak tahun 1967, hubungan melalui tiga sifat: antagonistic (1967-1982), respiprokal kritis (1982-1985) dan akomodatif (1985-1994) sesuai dengan hasil analisis dalam buku tersebut, hubungan Islam dan Negara terhadap Islam, dan persepsi Islam terhadap Negara, hubungan akomodatif yang terjadi satu decade belakangan ini tercipta karena persepsi Negara terhadap Islam bersifat positif begitu pula Islam terhadap Negara. Walaupun demikian dalam bukunya lagi

diterangkan juga bahwa tidak semua mereka yang menganut politik Islam ingin berkoalisi dengan partai-partai yang secara ideologis berbeda dengan mereka. Ini merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar namun dalam politik terkhusus nya politik praktis faktor penentu kemenangan bukan hanya soal persoalan ideologis namun bagaimana politik umat Islam bisa bersinergis dengan beberapa partai yang berbeda pendapat dengan mereka, tidak lain dan tidak bukan ini merupakan suatu bentuk Siyash beberapa orang yang menganut jalan politik Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sejarah, yang mana di dalamnya berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan yang pertama penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi¹⁷ terhadap sumber yang telah penulis dapatkan di lapangan. Sumber-sumber yang penulis dapatkan merupakan informasi yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji, yang pada tahapan selanjutnya akan diolah dan dikonversi menjadi fakta sejarah yang akan direkonstruksi.

Dalam tahapan ini, penulis mendapatkan sumber dari beberapa tempat, di mana terdapat sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat. Pertama, penulis menelusuri sumber tulisan dalam bentuk buku. Kedua, penulis memperoleh sumber dari perpustakaan Batu Api, berupa sumber tulisan. Ketiga, penulis memperoleh sumber dari

¹⁷ Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: ombak.

perpustakaan UIN Bandung berupa sumber tertulis. Yang terakhir, penulis memperoleh sumber dari Rekan dan Internet berupa sumber tertulis.

Setelah menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian penulis di lokasi-lokasi keberadaan sumber di atas, penulis akhirnya memperoleh beberapa sumber-sumber. Sumber-sumber yang penulis dapatkan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber-sumber primer dan beberapa sumber sekunder yang penulis peroleh dari lokasi-lokasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber buku

1. Buku Meruwat Muhammadiyah Karya Mua'rif, 2005
2. Buku Muhammadiyah Sebagai Oposisi Karya Suwarno, 2001
3. Buku yang berjudul Politik Inklusif Muhammadiyah karya DR haedar Nashir dan DR.Ir. Gunawan Budiyanto
4. Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010
5. Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*, Bandung: Mujahid, 2004, hlm. 10-13
6. PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, *Sejarah Muhammadiyah*, (PW- Muhammadiyah Lampung, 1996), hlm 6, dalam Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam..., Op.Cit.,*, hlm. 210
7. Politik Inklusif Muhammadiyah karya DR haedar Nashir dan DR.Ir. Gunawan Budiyanto
8. *Paradgma Politik Muhammadiyah* Ridho Al Hamdi
9. MPK PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah; Ideologi*

Khiththah dan Langkah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

10. Suwarno, Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara: Kontribusi Muhammadiyah dalam persepektif Sejarah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

11. Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah tentang Politik. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

b. Sumber Sekunder

Jurnal

a. Hikmawan Syahputra, Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014, Volume 1, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 2014.hlm. 1-8.

b. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 6, No. 2, 2005: 189-206

Skripsi

a. Yeni Yas Tuti, *Perilaku Politik Keagamaan Warga Muhammadiyah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Skripsi Program S1 Tahun 2012 M,

2. Kritik

Setelah melaksanakan tahapan heuristik, maka tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu melakukan tahapan kritik. Tahapan yang kedua ini dikenal dengan tahapan kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan, tujuannya adalah untuk menguji validasi ke otentikan dari sumber yang telah di dapatkan.¹⁸

Yang didapatkan oleh penulis merupakan mengumpulkan sumber yaitu beberapa buku tentang Sejarah Kultur Politik Muhammadiyah.

a. Kritik Ekstern

¹⁸ (A, Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak 2012), Hlm : 58.

Kritik Eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus dinyatakan dahulu autentik dan integralnya. Saksimata atau penulis itu harus diketahui sebagai orang yang dapat dipercaya.¹⁹

Sasaran atau tujuan dari penggunaan kritik ekstern adalah untuk menguji keautentikan (keaslian) suatu sumber atau dokumen. Uji keautentikan (keaslian) sumber atau meneliti keotentikan sumber tersebut.

b. Kritik Intern

Kritik Intern ialah melakukan pengujian terhadap isi sumber dan juga kritik yang diberikan terhadap isi penyampaian sumber sejarah tersebut. Tujuan dilakukannya kritik intern adalah untuk melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, dan melakukan perbandingan terhadap kesaksian dari setiap sumber, agar sumber yang didapatkan bisa dipercaya *kreadibilitasnya*.²⁰

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran sering disebut juga sebagai bidang subjektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah, benar, kerana tanpa adanya penafsiran dari sejarawan, maka data tidak akan bisa berbicara. Sejarawan jujur akan mencatumkan data dan keterangan dari mana data itu ia peroleh. Dengan adanya penafsiran akan data oleh

¹⁹ Dudung Abdurrahma. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta:Ombak, 2013), hlm. 11.

²⁰ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 67.

sejarawan maka isi data tersebut mampu di uraikan dengan sudut pandangan dan pemahaman dari sejarawan tersebut.²¹

Adapun teori umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Challenge and Response* yang dikemukakan oleh sejarawan Inggris, Arnold J. Toynbee dalam karyanya *A Study of History*. Inti dari teori ini adalah bahwa suatu peradaban lahir karena adanya suatu tantangan (*challenge*) dan jawaban (*response*). Kelahirannya bukan disebabkan oleh suatu hal melainkan berbagai hal dan bukan karena suatu entitas melainkan karena adanya keterhubungan.²²

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah yang penulis lakukan. Tahapan ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dipahami yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang semula merupakan fakta-fakta yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain menjadi satu rangkaian peristiwa yang masuk akal. Artinya dalam suatu penelitian yang dimulai dengan tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi tidak akan terungkap tanpa dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk karya tulis ilmiah.²³

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm.78.

²² Arnold J. Toynbee, *A Study History*, (London: Oxford University Press, 1948), Ed. 4, Vol. 1, hlm, 271.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 81.

Fungsi historiografi ini adalah menyampaikan informasi kepada orang banyak dalam memberikan jawaban terhadap perumusan yang diajukan.²⁴ Maka penulis menuliskannya menjadi sebuah peristiwa sejarah.

BAB I merupakan BAB pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjadi sebab penelitian ini menarik untuk dilakukan, setelah itu rumusan masalah atau persoalan yang akan diangkat oleh penulis, yang selanjutnya yaitu kajian Pustaka yang merupakan sumber-sumber yang digunakan dan nantinya akan menjadi sebuah perbandingan, dan yang terakhir yaitu metode penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II merupakan BAB yang membahas mengenai Kultur Politik Muhammadiyah sebelum tahun 1998.

BAB III merupakan BAB yang membahas mengenai Kultur Politik Muhammadiyah pada masa Reformasi dan persebaran kader-kader dan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Pemerintahan dan sebaran kader-kader serta tokoh-tokoh Muhammadiyah di kancah pergulatan politik dan Partai Nasional.

BAB IV merupakan BAB yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian Kultur Politik Muhammadiyah Di Indonesia pada masa Reformasi 1998-2014.

F. Kerangka Sementara (Outline)

Untuk mendapatkan sebuah gambaran dalam melakukan penelitian, maka disini penulis membuat kerangka sementara atau outline yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam usaha

²⁴Sulasman, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 148.

pencatatan bahan-bahan kedepannya. Namun tidak menutup kemungkinan ketika sudah melakukan penelitian ini, penulis dapat menemukan sebuah penemuan-penemuan baru yang dapat memberikan

perubahan. Maka dibuatlah kerangka sementara dengan gambaran sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kajian Pustaka
 1. Heuristik
 2. Kritik
 3. Interpretasi
 4. Historiografi
- E. Metode atau Langkah-langkah Penelitian

BAB II

PERKEMBANGAN KULTUR POLITIK MUHAMMADIYAH SEBELUM REFORMASI

- A. Muhammadiyah Pra Kemerdekaan
- B. Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan



1. Kultur Politik Muhammadiyah pada masa Orde Lama
2. Kultur Politik Muhammadiyah pada masa Orde Baru

BAB III

KULTUR POLITIK MUHAMMADIYAH PADA MASA REFORMASI

- A. Sebaran kader-kader Muhammadiyah di Pemerintahan
 1. Kader-kader Muhammadiyah pada masa Presiden Habibie
 2. Kader-kader Muhammadiyah pada masa Presiden Gusdur
 3. Kader-kader Muhammadiyah pada masa Presiden Megawati
 4. Kader-kader Muhammadiyah pada masa Presiden SBY
- B. Sebaran kader-kader Muhammadiyah di Partai-partai Nasional

BAB IV

KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

